

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN LISENSI *OFFICE*
COLLABORATION TOOLS SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk Katalog Elektronik sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Lisensi *Office Collaboration Tools* secara Nasional Untuk Katalog Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Lisensi *Office Collaboration Tools* Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENGADAAN LISENSI *OFFICE COLLABORATION TOOLS* SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan Lisensi *Office Collaboration Tools* Secara Nasional Untuk Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan persiapan pemilihan pada pelaksanaan konsolidasi lisensi *office collaboration tools*;
 2. melakukan pemilihan Penyedia lisensi *office collaboration tools* melalui negosiasi kepada prinsipal produsen;
 3. membantu penyiapan finalisasi kontrak payung antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan prinsipal produsen, distributor, dan/atau *reseller*;
 4. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan *E-purchasing* dari hasil konsolidasi lisensi *office collaboration tools* secara nasional untuk Katalog Elektronik; dan
 5. menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang dibutuhkan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Maret 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2023

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BUDANG
HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA KONSOLIDASI
LISENSI *OFFICE COLLABORATION*
TOOLS SECARA NASIONAL UNTUK
KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

SUSUNAN

TIM PELAKSANA KONSOLIDASI LISENSI *OFFICE COLLABORATION TOOLS*
SECARA NASIONAL UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
1.	Pengarah	Setya Budi Arijanta	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangah
2.	Ketua	Muhammad Aris Supriyanto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
3.	Anggota	1. Nuraini Darmastuti	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		2. Febri Kamalisa Rachman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		3. Muhamad Saifudin	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		4. Afri Dian Setiyani	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Unit Organisasi
		5. Intan Dana Lestari	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		6. Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
4.	Anggota tim Administrasi Konsolidasi Lisensi <i>Office Collaboration Tools</i>	1. Joko Budi Sulistyو	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		2. Astri Widya Sartika	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		3. Katri Kusuma Adi	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA